



► **MASALAH KETENAGAKERJAAN**

Korban PHK Tak Miliki Kontrak Kerja

UMBULHARJO- Sejumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) petugas pengamanan di Kantor Satpol PP Kota Jogja ternyata tak memiliki kontrak kerja dengan perusahaan *outsourcing*.

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

Temuan tersebut diperoleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja saat menggelar klarifikasi dengan para korban PHK, Jumat (9/6).

"Mereka sudah bekerja bertahun-tahun namun tidak memiliki kontrak kerja. Apakah memang mereka tidak punya, atau surat dipegang perusahaan *outsourcing*, itu yang akan kami dalam," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari Wulandari.

Menurutnya, ada kemungkinan lain sehingga korban PHK tidak dapat menunjukkan kontrak kerjanya. "Mereka bilang tidak

► Mereka sudah bekerja bertahun-tahun namun tidak memiliki kontrak kerja.

► Setiap tahun Hermawan dan rekan-rekannya diminta mengajukan lamaran ke perusahaan.

punya, tetapi mungkin lupa atau kontraknya per lima tahun atau ada kemungkinan lain. Kami segera memanggil perusahaan yang mempekerjakan mereka," ujarnya.

Kontrak kerja, menurut Rihari, dibutuhkan untuk menindaklanjuti aduan para korban PHK. "Kami kaji dulu kontraknya seperti apa, kalau ada bisa menjadi jelas, apa yang dilanggar dan lainnya. Soal belum adanya kontrak, kami belum dapat berkomentar," katanya. Rihari mendengar klarifikasi dari para korban PHK setelah beberapa waktu lalu mereka mengadu ke Dinsosnakertrans Kota Jogja.

Surat Lamaran

Ketiadaan kontrak kerja tersebut diakui oleh salah satu korban PHK, Hermawan. Menurutnya, setiap tahun dia dan rekan-rekannya

mengajukan lamaran ke perusahaan tersebut. "Kontrak kerja memang tidak ada, terakhir pada 2017. Setiap tahun pada Januari kami diminta membuat surat lamaran kerja," katanya.

Meskipun tak memiliki kontrak kerja, Hermawan mengaku terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan *outsourcing*. "Ada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti rapot di perusahaan. Untuk slip gaji tidak ada. Tiap bulan gaji ditransfer ke rekening kami," ujarnya.

Tak adanya kontrak kerja, menurut Hermawan, menandakan perusahaan *outsourcing* tersebut melanggar ketentuan ketenagakerjaan. "Kami selama ini tidak tahu, tetapi kalau dipikir-pikir soal tanggung jawab perusahaan, mereka kok bisa menggaji kami padahal tidak ada kontrak kerja," ujarnya.

Hermawan berharap meskipun tak memegang kontrak kerja, ia dapat dipekerjakan lagi. "Ini [bukti surat kontrak kerja] menjadi kelemahan kami, tetapi kami masih berharap bisa dipekerjakan lagi karena kesalahan kontrak kerja ini dari perusahaan yang tidak mengurusnya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 19 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005